
PENGEMBANGAN MODEL EVALUASI KINERJA PENDIDIKAN DAERAH¹**Oleh Sumarno & Hiryanto²****ABSTRACT**

The advancement of education in national education management decentralization system is determined by the area, namely the district or city as local government administrators, including the education sector. Schools in the tip of the spear of public service should not be the only parties who should be responsible for the success / failure of education. With this background this study aims to produce a performance evaluation model of educational development in the area.

The method used is an evaluation study designed to assess the performance of education development in the eleven strategic program that includes three pillars in accordance with national education development strategy that includes: (1) expanding access to education and equal opportunity, (2) improving the quality, relevance and power competitiveness, with focus on 5 programs and (3) governance good improvement, accountability and education with a focus pencitraan 3 program. The performance of each program enmeshed with 10 questions with yes / no and brief description. Tenth question stems sequentially in the presence or absence of policies and programs led to the existence of derivatives and the correct evaluation and follow-up of the evaluation. The research sample district education offices in 5 cities in the provinces of Yogyakarta and central Java, the southern part, the whole sample there are 11 districts of the city.

The results showed that the function-based evaluation of the performance indicators are still weak, so that when subjected to performance-based evaluation is also easy to look where and on strategic programs where performance is less optimal model performance evaluation of local education development allows the analysis is very simple because it only counts the answer "yes" which shows the extent to which each strategic program are managed through proper evaluation and more in-depth analysis with examining the information contained in the concise explanation. His results found that there are policy areas that become strategic umbrella of each program, although it merely implemented a strategic program, and not always followed with clear performance indicators and consequences for program evaluation.

Keywords: Performance Evaluation, Local Education

PENDAHULUAN

Desentralisasi pendidikan yang mengikuti desentralisasi pemerintahan diterapkan di Indonesia sejak diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 diikuti dengan PP no 25 tahun 2000, yang kemudian UU tersebut diubah disempurnakan menjadi UU no 32 tahun 2004 yang diikuti dengan PP 28 tahun 2007 dan Kepmendiknas no 50 tahun 2007. Sistem

²Penulis dosen PLS FIP Yogyakarta

pendidikan nasional sendiri lahir dan diundangkan diantara kurun waktu tersebut, yakni dengan UU no 20 tahun 2003, sudah dengan muatan desentralisasi.

Perkembangan regulasi tersebut menunjukkan dua hal, Pertama, adanya kepekaan terhadap persoalan yang muncul dari penerapan regulasi di lapangan; misalnya dengan UU no 22/1999 peran provinsi dalam urusan pendidikan tidak jelas, maka disempurnakanlah dengan UU no 32/2004 dan regulasi derivatifnya. Kedua, kuatnya pendekatan struktural yang mengandalkan kekuasaan, koersif, top down. Kenyataan menunjukkan bahwa perubahan struktural tidak sertamerta dengan perubahan kultural, hal ini menyebabkan timbulnya ketidakcocokan (incompatibilitas). Perangkat pemerintahan yang ada tidak serta merta siap menghidupkan tatanan layanan publik dalam pendidikan di sebuah desentralisasi, yang terjadi lebih cocok atau lebih mengarah pada lokalisasi.

Sejalan dengan dinamika perubahan tersebut, Dinas Pendidikan harus diakui bahwa masih dalam belajar menyesuaikan diri dengan benar, baik terhadap tuntutan nasional bahkan internasional, dan aspirasi lokal termasuk kepentingan daerah dan kepentingan pemerintah daerah.

Bank Pembangunan Asia (2001: 147) dalam bukunya: *Education and National Development in Asia*, merekomendasi kuat kebijakan penguatan sistem indikator pendidikan regional (*strengthening policy relevance of a regional system of educational indicator*). Kebijakan ini dapat mendukung pembuat kebijakan, pelaksana dan pengguna pendidikan, untuk memantau dan memfasilitasi perubahan pendidikan agar lebih mengarah dan leboh cepat mencapai kondisi pendidikan yang diharapkan. Adapun strategi untuk mengaktualisasikan kebijakan tersebut, direkomendasikan untuk secara terus menerus mengembangkan : 1) *a regional education indicator system*; 2) *new information collection and processsing capacities at the provincial and district levels*; and 3) *on-site assesment and monitoring capabilities at the school level*.

Studi Bank Dunia (2004), diawal desentralisasi mengemukakan 14 indikator dan menemukan kondisi sebagai berikut:

Tabel 4. Parameter Kondisi Masyarakat

| No | Parameter | Kondisi Indonesia |
|----|---|---|
| 1 | <i>Clear and efficient definition of assignment of roles and responsibilities</i> | Tidak, belum selesai dirumuskan |
| 2 | <i>Alignment of responsibility and authority</i> | Belum jelas |
| 3 | <i>State or provincial governments sharing authority with lower levels of government and with schools</i> | Tidak, provinsi tidak memiliki kekuasaan yang jelas dengan kabupaten/kota dan dengan sekolah. |
| 4 | <i>Effective management system and skills to implement the reform</i> | Tidak ditemukan, dan bahkan dengan variasi sangat tinggi |
| 5 | <i>Community, parent and privat sector participation</i> | Minat kuat, kesempatan terbatas |
| 6 | <i>Organizational and individual accountability</i> | Tidak ada mekanisme yang jelas |
| 7 | <i>Information of high quality and about quality</i> | Tidak ada, perlu dibangun infrastruktur sistem informasi |
| 8 | <i>Effective technical support and guidance</i> | Tidak ada, regulasi lebih untuk kontrol daripada untuk dukungan |
| 9 | <i>Equatable educational acces, opportunities and quality</i> | Tidak ada, disparitas tinggi antar distrik dan antar sekolah |
| 10 | <i>Efficient and equitable resource allocation</i> | Tidak, walaupun ada formula inefisien |
| 11 | <i>Support for decentralization, political and legal support</i> | Masalahnya tak terlalu serius, distrik antusias dengan kekuasaan baru |
| 12 | <i>Project design support decentralization objectives</i> | Tak ada masalah, hanya kurang bisa belajar dari rintisan desentralisasi |
| 13 | <i>Institutional and politial predictability</i> | Ada masalah, terkadang implementasi kontradiksi dengan kebijakan |
| 14 | <i>Form and process of resolvin disputes or contested rolesand responsibilities</i> | Tidak |

Lima tahun kemudian Bank Dunia (2009) mengembangkan indeks input pendidikan dan indeks output pendidikan dalam konteks investasi di kabupaten/kota. Meskipun hanya dengan 10 sampel kabupaten/kota, ditemukan adanya kuadran input baik dengan output baik, dan input jelek dengan output jelek; keduanya mudah secara wajar sangat mudah dipahami. Akan tetapi ada anomali yang menarik dengan input baik dengan output jelek, artinya kelemahan manajemen dan ada dengan input jelek tetapi output baik, artinya ada kapabilitas manajerial yang sangat menonjol dan yang terakhir ini amat langka.

Penelitian Sumarno dkk (2008), mengenai kapabilitas daerah dalam pengelolaan program-program pemerintah untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, juga menemukan keterbatasan daerah dalam perencanaan, pengorganisasiandan mengkoordinasikan pelaksanaan program.

Memperhatikan perkembangan proses pendesentralisasi pendidikan dan kajian ABD atas sejumlah negara Asia yang ternyata Indonesia bukan satu-satunya yang sedang bekerja keras untuk melakukan reformasi. Atas dasar pemikiran diatas , maka permasalahan penelitian ini dirumuskan “Bagaimana model evaluasi kinerja sektor pendidikan di daerah dalam konteks pembangunan daerah dan pengembangan pendidikan nasional yang terkait dan mampu memberikan masukan pada proses perencanaan dan pengelolaan berikutnya. Sedangkan penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk menganalisis praktik evaluasi kinerja sektor pendidikan yang dewasa ini terjadi, untuk menemukan validitasnya (ketepatan sasaran) dan kehandalan data informasi yang diperoleh dan merumuskan model evaluasi kinerja sektor pendidikan yang lebih baik sebagai follow up dari hasil praktik evaluasi, melalui prosedur penelitian pengembangan (R & D).

METODE PENELITIAN

Sebagai penelitian pengembangan (R & D) studi ini dimaksudkan untuk menghasilkan model evaluasi kinerja pembangunan pendidikan daerah sebagai bagian dari pembangunan pendidikan nasional yang memiliki karakteristik: a) menjangkau sasaran utama evaluasi kinerja yakni seberapa dan bagaimana kinerja berorientasi outcome atau manfaat nyata diupayakan, baru pada unsur-unsur output, transaksi atau proses dan unsur input; b) mengutamakan data faktual yang disilangkan dengan data perseptual untuk lebih mendekati kebenaran informasi dan walaupun masih ada bias diupayakan seminimum mungkin, c) memudahkan arus informasi dan pemahaman yang tepat ke berbagai pemangku kepentingan; serta tindak lanjut yang tepat sesuai dengan posisi dan peran masing-masing pemangku kepentingan, d) memungkinkan dipakai sebagai alat evaluasi diri, di samping evaluasi oleh phak eksternal atau evaluator independent, Instrumentasinya akan memadukan rating dengan dukungan data baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dan e)

menghindari penekanan yang berlebihan pada formalitas dan aspek-aspek administratif; aspek-aspek tersebut tetap dipenuhi sejauh memang menjadi bagian yang wajib dilakukan sebagai institusi pelayanan publik.

Dalam menghasilkan produk tersebut prosedur yang ditempuh melalui beberapa tahap sebagai berikut: Tahap 1, melakukan kajian atas konsep, teori, regulasi dan temuan penelitian relevan yang mencakup desentralisasi pendidikan dan evaluasi program berbasis indikator kinerja. Dari langkah ini ditemukan bahwa ada regulasi yang memberikan rambu-rambu kewenangan yang dilimpahkan ke kabupaten/kota dan bahwa kabupaten/kota harus mengacu pada kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat/provinsi. Sementara itu pendekatan evaluasi berbasis indikator kinerja lebih spesifik lagi berbasis output/outcome; mendorong studi ini untuk menetapkan beberapa program kunci saja yang diyakini merepresentasikan kinerja dinas pendidikan kabupaten/kota Misalnya : *to reach the unreachable*, dalam hal penuntasan akses pendidikan dasar; penguatan pendidikan nonformal agar tidak hanya berada dipinggiran; peningkatan akuntabilitas dan governance;

Tahap 2 melakukan perancangan model evaluasi dan instrumentasinya yang melibatkan reviewer melalui seminar persiapan penelitian yang didalamnya ada pembahas utama yang menguasai banyak informasi mengenai pembangunan, manajemen pendidikan dan evaluasi program. Rancangan ini dapat dideskripsikan sebagai berikut: 1. Cakupan meliputi: 1) Pilar 1 bidang akses dengan 3 indikator yang meliputi: (a) program khusus untuk anak kelompok tertinggal, (b) program pemberdayaan pendidikan nonformal, (c) program akses lainnya: 2) Pilar-2, bidang Mutu dengan 5 indikator, meliputi: (a) relevansi pendidikan dengan dunia kerja; (b) ujian nasional; (c) pendidik dan tenaga kependidikan; (d) relevansi pendidikan nonformal dan (e) program mutu lainnya. 3) Pilar – 3 bidang tatakelola dengan 3 indikator yang meliputi: (a) kemitraan dengan sektor lain, (b) manajemen berbasis satuan pendidikan dan (c) bidang tatakelola lainnya. 2. Indikator setiap program strategis ada 11 indikator dan masing-masing diungkap dengan 10 pertanyaan berurut-turut meliputi: (1) kebijakan daerah, (2) program/kegiatan strategis turunan dari kebijakan, (3) implementasi, (4) indikator keberhasilan, (5) data bukti dari indikator, (6) instrumen yang dipakai, (7) analisis data, (8) cara penyimpulan, (9) cara mengkomunikasikan dan klarifikasi serta (10) tindak lanjut hasil monev. 3. Bentuk pertanyaan diberi 2 (dua) kemungkinan jawaban yakni ya (1) dan tidak (0) dan apapun pilihan jawaban diteruskan dengan uraian singkat. Cara ini memungkinkan dilakukannya analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dirancang komputerisasinya sehingga dengan cepat dan akurat dapat dihasilkan analisis profil untuk setiap kabupaten/kota.

Tahap – 3 menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data di kabupaten/kota di DIY (4 kabupaten, 1 kota dan di Jawa tengah (4 kabupaten) yang berdekatan dengan

provinsi DIY. Tahapan ini memiliki manfaat ganda yakni: 1) menjajagi keterbacaan (readability and understandability) instrumen oleh personel di lapangan dan 2) memperoleh gambaran mengenai performansi pembangunan pendidikan daerah kabupaten/kota dan mengevaluasinya dengan standar dan prosedur yang sudah dipersiapkan.

Dan tahap – 4 melakukan pengemasan akhir model evaluasi dalam hal ini disusunnya buku panduan evaluasi dengan harapan model yang dihasilkan akan dapat dipakai sebagai pedoman evaluasi diri oleh masing-masing dinas atau akan dipakai oleh pihak eksternal evaluator independent.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian tentang evaluasi kinerja di DIY dan sekitarnya yang mencakup delapan kabupaten dan satu kota, sebagai bukti data dan informasi apa saja yang dapat dihasilkan oleh model evaluasi kinerja pembangunan pendidikan kabupaten/kota. Dalam hal ini akan dipaparkan dalam dua bagian yaitu:

1. Profil tematik 3 pilar antar kabupaten/kota yang didalam pembahasannya memanfaatkan informasi naratif dari masing-masing butir pertanyaan.
2. Pofil total kinerja pembangunan pendidikan kabupaten/kota untuk memperoleh gambaran seutuhnya di setiap kabupaten/kota, di pilar mana dan atau program mana yang sudah baik dan mana yang masih memerlukan banyak perhatian dan komitmen dari penguasa pendidikan di daerah.

Profil tematik 3 pilar antar kabupaten/kota

a. Pilar perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan

Perhatian terhadap kelompok marjinal nampak kontras, kabupaten di DIY pada umumnya rendah, bahkan di kota Yogyakarta tidak ada informasi sama sekali, sementara itu di kabupaten Jateng sangat tinggi kinerjanya. Hal tersebut dapat berarti dua macam kemungkinan, pertama, skala persoalan anak tak terlayani sudah sedikit di daerah yang kinerjanya rendah, skala persoalannya masih tinggi di daerah yang kinerjanya tinggi. Kedua, sebenarnya di daerah dengan kinerja rendah tersebut juga masih banyak persoalan hanya memang kurang mendapat perhatian yang cukup dari dinas pendidikan setempat.

Dalam pemberdayaan pendidikan Nonformal, DIY memiliki perhatian yang lebih terhadap pendidikan nonformal dibandingkan dengan sampel kabupaten di Jawa tengah, dalam kaitannya dengan perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar. Mungkin pada waktu survei ini dilakukan DIY memang sedang disibukkan dengan Jambore PTK-PNF tahun 2009, dimana Jateng mendapatkan giliran menyelenggarakan Jambore PTK-PNF tahun 2008 yang lalu.

Dalam hal tema lain terkait dengan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, DIY tampil lebih kreatif dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Beberapa contoh program di DIY adalah : BOP, beasiswa Dewan Pendidikan (Bantul), beasiswa pendidikan kesetaraan, lifeskill dan keaksaraan fungsional (Sleman) PAUD (gunungkidul) BOSDA, Jaminan Pendidikan Daerah, kuota pemegang KMS, pendidikan inklusi (kota jogja), percepatan wajar dikdar 9 tahun, pemberdayaan kejar paket A/B. Sementara itu kabupaten wonogiri satu-satunya yang melaporkan tema lain, mengutarakan adanya sosialisasi pendidikan kesetaraan kejar Paket A, B dan C

b. Pilar peningkatan mutu, daya saing dan relevansi pendidikan

Manajemen peningkatan mutu di DIY dilaporkan sangat beragam, ada yang kreatif bekerjasama dengan perguruan tinggi, pelatihan PTK dan KTSP (Bantul), pemberdayaan sekolah kejuruan dengan kerjasama dengan dunia usaha dan industri (Sleman dan Jogja) dengan fungsi manajemen kurang tuntas. Lain halnya dengan kabupaten di Jawa tengah yang bertetangga dengan DIY melaporkan adanya fungsi penuh sampai dengan evaluasi dan tindak lanjut pada setiap program. Oleh karena yang dipersoalkan adalah relevansi dengan dunia kerja, maka wajar bahwa yang diungkapkan adalah di sekitar sekolah kejuruan, misalnya program job matching (Klaten), program studi berbasis IT (wonogiri), memperbanyak SMK (purworejo) businnes centre (Magelang)

Sejalan dengan pemberdayaan PNF untuk perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan, dalam hal peningkatan mutu, daya saing dan relevansi PNF dengan dunia kerja, nampak DIY tampil dengan kinerja lebih baik daripada daerah tetangganya. Ada yang sampai menghasilkan perda untuk peningkatan mutu pnf (gunungkidul), kerjasama dengan dunia usaha dan industri, lifeskill dan perhatian khusus terhadap evaluasi hasil belajar. Di kabupaten sekitar DIY tidak ditemukan program-program spesifik, yang dimunculkan juga penguatan kejar Paket A-B-C Cuma dilaporkan adanya pengiriman magang ke Jepang dan Korea (Klaten); dengan manajemen program yang kurang utuh karena fungsi evaluasi tak dilakukan secara optimal.

Mengenai pendidik dan tenaga kependidikan, DIY tampil lebih variatif dari sisi keutuhan manajemen programnya, dimana fungsi evaluasi juga tidak terjadi secara tepat dan optimal. Regulasi terkait dari pemerintah pusat menjadi acuan (jogja), peningkatan kualifikasi (bantul), sudah lama dilakukan sehingga banyak guru berpendidikan S2, bahkan mulai S3 dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Di Jawa tengah juga dilakukan peningkatan kualifikasi, pemberian reward untuk yang berprestasi, pencermatan beban kerja guru, yang kurang diupayakan kesempatan di sekolah lainnya, tentunya dalam rangka memenuhi ketentuan agar berhak memperoleh tunjangan profesi.

Ujian nasional dipandang sebagai salah satu hal strategis, nampaknya apa yang terjadi di DIY mirip dengan daerah tetangganya dari Jawa Tengah. Target prosentase lulusan tinggi memang menjadi kebijakan daerah (bantul), dukungan teknis, administratif serta anggaran pada umumnya dipersiapkan oleh daerah. Namun kelemahannya terletak pada apakah UN dievaluasi dengan cara benar, adan apalagi bagaimana menindaklanjuti hasil evaluasi UN, yang tidak mudah untuk dilakukan secara internal oleh Pemda sendiri. Di jawa tengah ada yang menarik bahwa dalam kaitanya dengan UN dikaitkan juga rekrutmen, pembinaan dan penugasan kepala sekolah (Magelang).

Mengenai tema lain dalam peningkatan mutu di DIY ada perhatian atas keserasian perkembangan peserta didik (jogja), sistem penerimaan peserta didik baru yang lebih baik (bantul). Di Jawa tengah hanya ada data dari kabupaten Wonogiri misalnya dengan peningkatan keefektifan jam belajar dan pemberdayaan MGMP/KKS di kabupaten Purworejo dan itupun tak jelas bagaimana evaluasi pelaksanaan dan manfaat yang dihasilkan.

PILAR PENINGKATAN TATAKELOLA DAN AKUNTABILITAS PENDIDIKAN

Untuk tata kelola dan akuntabilitas hanya dipakai dua program strategis yakni MBS, Manajemen berbasis sekolah dan keterpaduan pembagunan pendidikan dengan pembangunan daerah termasuk dengan pendidikan yang di bawah yurisdiksi Departemen Agama.

Peningkatan akuntabilitas pendidikan dilakukan dengan berbagai cara, kebanyakan secara konvensional melakukan pelatihan atau penataran, ada yang sudah sampai pada penyusunan laporan akuntabilitas, namun tak diikuti dengan evaluasi sejauh mana keberhasilan dari pembuatan LAKIS tersebut ditinjau dari nilai tambah substantif, bukan sekedar memenuhi permintaan administratif. Di Jawa Tengah ada yang pernah bekerjasama dengan USAID dan UNICEF (Klaten), di samping itu berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas manajerial sekola, dari urusan administrasi umum seperti penyusunan RAPBS berbasis program; sampai dengan penyusunan KTSP (magelang).

Di bidang keterpaduan manajemen, di DIY ada daerah dengan perhatian khusus untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pusat dan derah lain (bantul), ada yang mengutarakan jalinan kerjasama internal antara sekolah dengan madrasah, pemberian bantuan guru agama di sekolah dan pemberian bantuan guru umum di madrasah. Di Jawa Tengah ada yang menyelenggarakan sekolah berwawasan khusus (purworejo), pengkoordinasian kalender sekolah, panitia bersama UN (magelang), namun ada kabupaten yang tak menampilkan informasi apapun terkait dengan upaya agar pembangunan pendidikan lebih terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik di daerah.

Contoh tema lain adalah terbitnya Perbup mengenai sistem informasi dan pengendalian, termasuk laporan keuangan (bantul), meskipun tak dengan perbup daerah lain juga menaruh perhatian atas perlunya membangun sistem informasi pendidikan. Penguatan MBS memang benar juga dapat memperbaiki citra dan akuntabilitas sekolah, sebagaimana diprogramnya di Wonogiri; di samping itu dimunculkan pula mengenai adanya alokasi khusus dari APBD II untuk mendukung pembangunan pendidikan.

PROFIL KINERJA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

Di dalam bagian berikut ini dipaparkan profil kinerja pembangunan pendidikan kabupaten/kota dengan mengacu pada sebelas (11) program strategis yang ada bagian sebelumnya yang dipaparkan secara terpisah-pisah

Daerah Istimewa Yogyakarta

Di antara kelima kabupaten/kota di DIY, kabupaten kulonprogo yang tidak menampilkan data mengenai peningkatan tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan pendidikan. Kemudian dikemukakan bahwa di antara empat wilayah ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kota Yogyakarta

RTO atau pendaftaran siswa baru dengan sistem online merupakan program unggulan atau terobosan. Masyarakat dapat melakukan pemantauan lewat internet, sehingga dapat memperkirakan sendiri di sekolah mana anak memiliki kemungkinan untuk diterima. Di samping itu sudah ada kebijakan agar terdapat keterpaduan dalam pembangunan pendidikan. Di antaranya ada program jaminan pendidikan dasar (JPD), BOS Daerah dan bantuan ujian nasional. MBS diprogramkan dan dilaksanakan akan tetapi proses evaluasinya belum tentu berbasis output dan apalagi outcomes; sehingga tidak jelas pula cara-cara tindak lanjut untuk waktu mendatang.

2. Kabupaten Bantul

Salah satu ciri khas di Bantul adalah kuatnya program kemitraan mulai dari workshop dan rapat koordinasi. Ada kemiripan dengan kota Yogyakarta, dimana untuk MBS baik di sekolah maupun di madrasah ada kebijakan dan program serta implementasinya, akan tetapi tidak melakukan evaluasi dengan benar dan apalagi sampai pada rencana tindak lanjut berbasis simpulan evaluasi.

3. Kabupaten Gunungkidul

Sangat berbeda dengan wilayah lain, di Gunungkidul justru yang menonjol adalah program MBS, ada evaluasi yang hasilnya menjadi basis tindak lanjut. Dengan kata ada komitmen memperhatikan pada level satuan pendidikan; akan tetapi dalam hal

menjalin hubungan kemitraan nampaknya lebih mengandalkan pada rutinitas, sehingga tidak melaporkan adanya mekanisme tindak lanjut berbasis evaluasi kinerja

4. Kabupaten Sleman

Di Sleman relatif utuh dalam melaksanakan MBS dan program pemberdayaan lainnya. Akan tetapi dalam hal menjalin hubungan kemitraan dengan lembaga lain, nampaknya tak terlalu kuat dalam melakukan analisis data hasil evaluasi; sehingga meskipun ada simpulan dan konfirmasi atau klarifikasi; tidak jelas tindak lanjutnya.

Secara keseluruhan profil tersebut menginformasikan bahwa kota Jogja dan kabupaten Sleman relatif lebih baik kinerjanya dibandingkan dengan tiga kabupaten lainnya, sebagaimana diindikasikan oleh luasnya daerah web yang terisi. Web yang tidak terisi dengan merata mengandung makna bahwa kinerja pembangunan pendidikan di daerah tersebut ada wilayah strategis yang kurang digarap dengan baik, atau kurang dikuasai informasinya secara komprehensif.

JAWA TENGAH

1. Kabupaten Purworejo

Data dari Purworejo ini menunjukkan lengkapnya kegiatan dari kebijakan, program, sampai dengan rencana tindak lanjut berbasis hasil evaluasi. Untuk program kemitraan dengan berbagai pihak MBS dan lainnya.

2. Kabupaten Wonogiri

Di Wonogiri, tidak ada informasi mengenai penguatan hubungan kemitraan pendidikan dengan berbagai pihak. Berbagai kegiatan terkait dengan MBS dan RAPBS diimplementasikan, namun tak sampai pada penentuan rencana tindak lanjut.

3. Kabupaten Magelang

Berbeda dengan kabupaten lain, di kabupaten Magelang yang dilaporkan cukup lengkap adalah dalam kaitannya dengan penjalinan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak. Sementara itu tidak dilaporkan adanya pembinaan MBS dan RAPBS sebagai bidang garapan nyata di sekolah

4. Kabupaten Klaten

Klaten dengan BOSDA yang relatif lengkap direncanakan, dilaksanakan, dipantau sampai dengan tindak lanjutnya. Akan tetapi tidak dilaporkan adanya upaya menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak.

Dari empat sampel kabupaten di sekitar DIY, nampak bahwa kabupaten wonogiri relatif lebih baik kinerjanya di dalam membangun pendidikan di daerahnya dengan perhatian relatif merata di tiga pilar pembangunan pendidikan; sedikit lebih baik

berikutnya adalah kabupaten Purworejo yang menurut data yang dilaporkan kurang perhatian atas pembangunan pendidikan nonformal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan pendidikan kabupaten/kota belum dilakukan secara komprehensif terhadap kinerja sektor pendidikan di daerah. Banyak program tidak dievaluasi atau dievaluasi akan tetapi tidak jelas konsep mengenai indikatornya, instrumennya dan penyimpulannya serta tindak lanjut yang terencana. Daerah lebih banyak sebagai pelaksana program pemerintah pusat, beberapa daerah kreatif menelorkan berbagai kebijakan dan program, semua program terlaksana, hanya monevnya belum berorientasi kinerja dan hal ini menyebabkan kurang jelasnya kemajuan pendidikan daerah, belum ada upaya mengkaitkan hasil program dengan proses pelaksanaan dan input sehingga kurang komprehensif serta kurang dipahami bukan saja progress tetapi juga eksplanasi atas tingkat pencapaian progress.
2. Model Evaluasi kinerja pembangunan pendidikan kabupaten/kota yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat mengenali dan mempertimbangkan kinerja sektor pendidikan daerah dengan cakupan:
 - a. Pilar perluasan dan pemerataan akses kesempatan pendidikan terutama untuk mereka yang unreachable
 - b. Pilar mutu, relevansi dan daya saing
 - c. Pilar tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan
 - d. Setiap tema diungkap dengan skala model Gutman terdiri dari 10 butir pertanyaan yang harus dijawab secara tertutup (ya/tidak) dan dilengkapi deskripsi naratif ringkas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Don. 2002. *Education and National Development Priorities, policies and Planning*
- Asian Development Bank. 2001. *Education and Nation Development in Asia*. ADB
- Education in Developing Asia, Vol 1. Hongkong: ADB & Comparative Education Research Centre
- PP Nomor 38 tahun 2007, tentang *Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*
- Permendiknas nomor 50 tahun 2007, tentang *Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah*

- Sukardi, dkk 2007. *Evaluasi efikasi pelaksanaan program perluasan dan pemerataan pendidikan dasar*. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Yogyakarta: Lembaga Penelitian
- Sumarno, dkk. 2008. *Kemampuan Daerah dalam Implementasi Pembangunan pendidikan dasar*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UNY.
- Sumarno. 2008. *Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Pendidikan di DIY*. Yogyakarta: Laporan Penelitian Mandiri
- UU Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
- UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- World Bank. 2004 *Education in Indonesia: Managing the transition to decetralization*. The World Bank
- _____. 2009. *Investing in Indonesia's education at the district level: An Analysis of regional public expenditure and financial management*. The World Bank